

**ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH
BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA
PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *SHARIA*
FINANCIAL INCLUSION
(Studi pada pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

**KIKI RIZKIA NURAINI
NPM. 1551020196**

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH
BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA
PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *SHARIA*
FINANCIAL INCLUSION
(Studi pada pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola uang yang dimilikinya secara bijak, baik dalam bentuk investasi maupun penyaluran ke bidang sosial. Lebih khusus lagi, mengacu pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif terhadap investasinya agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya. Program Strategi Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh OJK, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, tingkat literasi keuangan yang rendah menjadikan kurangnya pemanfaatan fasilitas di sektor keuangan oleh masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pola sosialisasi literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya? 2). Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya? 3). Bagaimana peran literasi keuangan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan *sharia financial inclusion* pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sosialisasi literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya, tingkat literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya dan peran literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan *sharia financial inclusion*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 94 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sosialisasi literasi keuangan syariah kepada para pedagang sudah terapkan dengan tepat, namun dalam pemberian intensitas sosialisasi langsung masih kurang maksimal. Tingkat literasi keuangan syariah pada pedagang berada pada tingkat kategori rendah. Peran literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada pedagang Plaza Bandar Jaya juga dapat dikatakan belum maksimal karena masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah pada pedagang hal ini dibuktikan dengan dari 94 responden, hanya 31 responden yang sudah menjadi nasabah dan memiliki rekening di bank syariah. Sehingga sebagai bentuk dari percepatan ekonomi, diharapkan seluruh pihak turut serta dalam kegiatan edukasi mengenai literasi keuangan syariah guna tercapainya *sharia financial inclusion*.

Kata kunci : literasi keuangan, bank syariah, inklusi keuangan syariah (*sharia financial inclusion*).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Rizkia Nuraini
NPM : 1551020196
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Oleh Bank Mandiri Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan *Sharia Financial Inclusion* (Studi Pada Pedagang Di Pasar Plaza Bandar Jaya)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 September 2019
Penulis,

KIKI RIZKIA NURAINI
NPM.1551020196



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Oleh Bank Mandiri Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan *Sharia Financial Inclusion* (Studi Pada Pedagang Di Pasar Plaza Bandar Jaya)

Nama : Kiki Rizkia Nuraini

NPM : 1551020196

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 198008012003121001

M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy.

NIP. 198605172015031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SHARIA FINANCIAL INCLUSION (STUDI PADA PEDAGANG DI PASAR PLAZA BANDAR JAYA)"** disusun oleh Kiki Rizkia Nuraini, NPM: 1551020196, Program Studi: Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 15 November 2019.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Rubhan Maskur, M.Pd**

Sekretaris : **Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

Penguji 1 : **Syamsul Hilal, S.Ag. M.Ag**

Penguji II : **M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Raslan Abdurrahman, M.S.I.
NIP.198008012003121001



MOTTO

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ زَكَاةُ مَا لَا يَعْنِيهِ

“Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang: jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”

(H.R At-Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Udin dan Ibu Kusmiyati. Yang saya hormati dan saya banggakan, selalu menguatkan saya sepenuh jiwa raga, merawat, bekerja keras untuk memberi nafkah agar anaknya dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung dan selalu memberikan do'a serta motivasi yang tulus dan ikhlas, kasih sayang serta cinta yang luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adikku tercinta Aditya Komarudin, yang menjadi pelengkap dalam keluargaku dan tidak lupa seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahkan nama yang baik dari kedua orang tua dengan nama Kiki Rizkia Nuraini, dilahirkan di Bandar Lampung pada 22 Februari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Udin dan Ibu Kusmiyati. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan adalah :

1. SDN 01 Way Galih, Tanjung Bintang Lampung Selatan, diselesaikan pada tahun 2009
2. SMP Tunas Dharma, Tanjung Bintang Lampung Selatan, diselesaikan pada tahun 2012
3. SMA Yadika Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2015

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT serta berkat dukungan dari bapak, ibu serta keluarga, akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester I pada tahun ajaran 2015.

Bandar Lampung, 30 September 2019

Yang Membuat,

Kiki Rizkia Nuraini
NPM.1551020006

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Oleh Bank Mandiri Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan *Sharia Financial Inclusion* (Studi Pada Pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya)”** ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E), Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, atas terselesaikannya skripsi ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing serta mendidik dan mengarjarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang inshaallah bermanfaat bagi penulis dan senantiasa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Udin dan Ibu Kusmiyati tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepadaku. Serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
7. Keluarga besar Perbankan Syariah F angkatan 2015 yang selama ini telah menjadi teman yang baik selama menempuh proses perkuliahan.
8. Sahabat tercintaku Fitri Mulianda, Fitri Novianti Pramudya, Herdalisa dan Riza Rahmayuni yang telah berjuang bersama dalam memperoleh gelar dan cita-cita.

9. Keluarga KKN 159 Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang telah mengabdikan bersama dalam menyelesaikan tugas sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Khususnya kelas F yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
11. Bapak Ibu pegawai PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya yang telah memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner dan menjawab beberapa pertanyaan wawancara dalam skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terjalin dalam *Ukhuwah Islamiyah*.

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampunan dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 30 September 2019

Kiki Rizkia Nurani
NPM 1551020196

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang..... | 3 |
| D. Batasan Masalah | 15 |
| E. Rumusan Masalah | 16 |
| F. Tujuan Penelitian | 16 |
| G. Manfaat Penelitian | 16 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Sosialisasi | |
| 1. Pengertian Sosialisasi | 23 |

| | |
|--|----|
| 2. Manfaat Sosialisasi..... | 24 |
| 3. Tahapan-tahapan Dalam Sosialisasi..... | 25 |
| B. Literasi Keuangan Syariah | 25 |
| 1. Pengertian Literasi Keuangan..... | 25 |
| 2. Pengertian Literasi Keuangan Syariah | 27 |
| 3. Manfaat Literasi Keuangan | 30 |
| 4. Aspek-aspek dalam Literasi Keuangan | 31 |
| 5. Tahapan Dalam perencanaan keuangan | 36 |
| 6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan | 37 |
| 7. Indikator Literasi Keuangan Syariah | 42 |
| C. Perbankan Syariah | 50 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 50 |
| 2. Landasan Hukum Bank Syariah | 51 |
| 3. Fungsi Bank Syariah | 59 |
| 4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 62 |
| 5. Produk dan Jasa Bank Syariah..... | 64 |
| D. <i>Sharia Financial Inclusion</i> | 68 |
| 1. Definisi Inklusi Keuangan Syariah | 68 |
| 2. Tinjauan Saharia Financial Inclusion..... | 69 |
| 3. Konsep Keuangan Inklusif | 70 |
| 4. Visi dan misi Keuangan Inklusif..... | 72 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 74 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 80 |

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek | 83 |
| 1. Gambaran Umum Dan Letak Geografis Pasar Plaza Bandar jaya | 82 |
| 2. Gambaran Umum Pasar Tradisional Bandar jaya..... | 84 |
| 3. Visi dan Misi Pasar Plaza Bandar Jaya | 87 |
| B. Gambaran Umum Responden..... | 87 |

| | |
|---|----|
| 1. Karakteristik Responden | 88 |
| C. Distribusi Hasil Jawaban Kuesioner Responden | 89 |
| 1. Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah..... | 90 |
| 2. Pengetahuan Tabungan Syariah..... | 91 |
| 3. Pengetahuan Asuransi Syariah | 92 |
| 4. Pengetahuan Investasi Syariah | 93 |
| 5. Penggunaan Jasa Perbankan Syariah dan <i>Sharia Financial Inclusion</i> | 95 |

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

| | |
|--|-----|
| A. Analisis Pola Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Pedagang Di Pasar Plaza Bandar Jaya..... | 98 |
| B. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya..... | 100 |
| C. Analisis Peran Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan <i>Sharia Financial Inclusion</i> Pada Pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya | 116 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 121 |
| B. Saran | 122 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| 1. Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya..... | 14 |
| 2. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional | 62 |
| 3. Perbedaan dengan penelitian terdahulu..... | 78 |
| 4. Distribusi karakteristik responden | 88 |
| 5. Jawaban responden tentang pengetahuan dasar keuangan syariah..... | 90 |
| 6. Jawaban responden tentang tabungan syariah..... | 91 |
| 7. Jawaban responden tentang asuransi syariah | 92 |
| 8. Jawaban responden tentang investasi syariah..... | 93 |
| 9. Responden yang menjadi nasabah bank syariah..... | 95 |
| 10. <i>Sharia fianancial inclusion</i> | 95 |
| 11. Distribusi literasi keuangan syariah pedagang | 101 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------|----|
| 1. Kerangka pemikiran..... | 80 |
|----------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 : Surat Isin Riset Dari Plaza Bandar Jaya
- Lampiran 4 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Berita Acara Munaqasyah
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 7 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan memahami judul proposal ini yaitu “ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *SHARIA FINANCIAL INCLUSION* (Studi pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya)”. Maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.
2. Literasi Keuangan adalah terjemahan dari financial literacy yang artinya melek keuangan. Yaitu rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.¹

¹ <http://www.ojk.go.id>, *Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*, diakses 30 Maret 2019 pukul 22.30 WIB

3. Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits.²
4. Sharia Financial Inclusion (Inklusi Keuangan Syariah) adalah hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.³
5. Lembaga keuangan syariah adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil.⁴
6. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.⁵

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa maksud dari judul ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA

² Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*(Bogor Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 33.

³ Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), h. 5-6.

⁴ “Belajar Ilmu Ekonomi Syariah”, tersedia di: <http://www.ekonomiislam.com> diakses Rabu, 27 Maret 2019 pukul 20.45 WIB

⁵ Frida hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta:Sinar Grafika,2009), h. 2.

MENINGKATKAN *SHARIA FINANCIAL INCLUSION* (Studi pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya)

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dipilihnya judul “ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *SHARIA FINANCIAL INCLUSION* (Studi pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya)” antara lain:

1. Alasan Objektif

Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, tingkat literasi keuangan yang rendah menjadikan kurangnya pemanfaatan fasilitas di sektor keuangan oleh masyarakat. Selain itu, buruknya pengelolaan keuangan pribadi dapat mengakibatkan kesulitan keuangan seperti kesalahan penggunaan kartu kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan.

Melalui gerakan literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Jasa Keuangan Syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa perbankan syariah, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Banyaknya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang

Data pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif meningkat kecuali pada tahun 2015 menurun sebesar 4,87%, dibandingkan akhir 2014 sebesar 4,89%, ternyata naik kembali menjadi 5,33% di tahun 2016, 5,44% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 5,70% pada Juni 2018.⁶ Namun hal tersebut tidak dapat menyaingi bahkan jauh dibawah pangsa pasar perbankan konvensional. Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan presentase. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perbankan syariah di Indonesia akan menjadi penggerak ekonomi. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasalnya, selama ini perbankan syariah masih pengekor penggerak ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia, menurut Bank Dunia pada tahun 2010 secara nasional akses ke sistem keuangan formal hanya menjangkau sekitar 52% dari total

⁶ "Snapshot perbankan syariah Indonesia 2017", tersedia di: [https:// www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id), diakses Rabu, 16 Januari 2019 pukul 19:10 WIB

penduduk. Di sisi lain, terdapat 31% penduduk mengakses keuangan informal dan 17% penduduk yang mengalami keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan). Masih menurut Bank Dunia sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sedangkan 18% menyimpan di sektor informal seperti arisan, klub tabungan, dan kelompok dana bergulir, sementara 32% lainnya tidak memiliki tabungan. Dalam hal pinjaman, sebanyak 33% masyarakat cenderung memilih menggunakan sektor keuangan informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan, dan rentenir dibandingkan dengan sektor keuangan formal, yakni sebesar 17%. Ironisnya, sekitar 40% penduduk tidak memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan baik formal maupun informal.⁷

Sehubungan dengan kondisi penggunaan jasa perbankan syariah yang masih rendah, maka gerakan pembangunan literasi keuangan khususnya keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah keharusan yang mutlak dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, dengan perencanaan perencanaan strategis dan langkah-langkah inisiatif berupa program aksi dengan melibatkan semua elemen masyarakat, khususnya *stake holders* keuangan syariah dan regulator keuangan. Dalam upaya membangun literasi keuangan syariah di Indonesia diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara berbagai komponen masyarakat terutama pegiat ekonomi syariah. Berbagai Negara di dunia sudah melakukan gerakan literasi keuangan secara sukses. Mereka berpandangan bahwa literasi keuangan merupakan program

⁷ *Ibid*, 2.

strategis yang sama urgennya dengan program-program nasional lainnya. Sehingga literasi keuangan menjadi salah satu program prioritas bagi banyak negara di dunia, seperti Kanada, Australia, India, USA, Inggris, dsb. Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak.

Istilah literasi keuangan sendiri yang dikemukakan literatur dan oleh para pakar keuangan tidak ada satupun yang persis sama. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola uang yang dimilikinya secara bijak baik dalam bentuk investasi maupun penyaluran ke bidang sosial. Lebih khusus lagi, mengacu pada seperangkat ketrampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif terhadap investasinya agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya.⁸

Inilah tujuan utama adanya Strategi Nasional Literasi Keuangan, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, tingkat literasi keuangan yang rendah menjadikan kurangnya pemanfaatan fasilitas di sektor keuangan oleh masyarakat. Selain itu, buruknya pengelolaan keuangan pribadi dapat mengakibatkan kesulitan keuangan seperti kesalahan penggunaan kartu kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Kesulitan keuangan dapat mengakibatkan stress, rendahnya rasa percaya diri,

⁸ Rike Setiawati, "Pengaruh Literasi Keuangan dalam meningkatkan penggunaan jasa keuangan pada mahasiswa Mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 1, No. 1, 2013, h. 35

bahkan untuk sebagian keluarga dapat mengakibatkan perceraian. Literasi keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Hasil survei OJK pada tahun 2016, tingkat literasi syariah masyarakat Indonesia masih rendah yaitu baru sebesar 8,11% masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi, sedangkan literasi keuangan syariah di daerah Lampung sendiri masih hanya sebesar 6,55% dan inklusi keuangannya sebesar 18,18%.⁹

Banyak faktor dan variabel yang menyebabkan mengapa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah. Pertama, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Istilah-istilah Arab yang mewarnai nama produk keuangan syariah menjadi alasan mengapa tingkat pemahaman masyarakat demikian rendah, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme masing-masing akad dan produk. Masih terlalu banyak yang belum mengerti dengan sistem dan produk keuangan syariah, apa perbedaannya dan keunggulannya dengan keuangan biasa. Kedua, belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan keuangan syariah secara simultan, terencana dan berkesinambungan. Ketiga, terbatasnya pakar dan SDM (Sumber Daya Manusia) keuangan syari'ah untuk mengedukasi keuangan syariah. Keempat, peran para ulama, ustad, dan da'i masih relatif kecil dan tingkat pengetahuan mereka tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Ulama yang berjuang keras mendakwahkan keuangan syariah selama ini terbatas pada Dewan

⁹“Literasi Keuangan Syariah di Indonesia” (On-Line), tersedia di: <https://www.parstoday.com> (27 Maret 2019).

Syariah Nasional (DSN) dan kalangan akademisi yang telah tercerahkan. Kelima, para akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam belum memainkan peran yang optimal dalam sosialisidan edukasi ekonomi syariah. Keenam, peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan keuangan syariah di Indonesia yang masih sangat rendah.¹⁰

Melalui gerakan (*harakah*) literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Jasa Keuangan Syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa perbankan syariah, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Selanjutnya *harakah al awa'iyah lil muammalah al- maliyah* (Gerakan Literasi Keuangan Syariah) ini mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini akan memotivasi industri sektor jasa perbankan syariah untuk meningkatkan edukasi publik dan proaktif mengembangkan produk jasa perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.¹¹

Keluhan terkait dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang, permasalahan produk perbankan syariah yang tidak variatif, serta belum dapat diakses masyarakat, sebetulnya dapat diatasi dengan strategi literasi keuangan syariah. Menurut Badan Pusat Statistik

¹⁰“Membangun Literasi Keuangan Syariah” (On-Line), tersedia di: <http://www.agustiantocentre.com> (27 Maret 2019).

¹¹ *Ibid*, h. 2.

(BPS) yang melakukan penelitian menyeluruh pada struktur populasi Indonesia setiap dekade, dengan jumlah umat muslim 87,81% dari populasi penduduk Indonesia¹² perlu adanya sinergisitas antara para ulama, da'i, dan akademisi muslim untuk memberantas kemiskinan dengan upaya membangun literasi keuangan syariah pada masyarakat muslim. Diharapkan ketika mereka mempunyai well literate dampak terhadap penggunaan jasa perbankan syariah juga akan ikut naik persentasenya.

Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Isu-isu sosial berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*Income Inequality*) pun masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi berupa kerjasama regional multilateral seperti G20, OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*), the World Bank, IMF (*The International Monetary Fund*) ADB (*Asian Development Bank*) dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif (*financial inclusion*).¹³ Pada pidatonya di KTT G20 di Hangzhou, China September 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan hanya 21, 8% penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori keuangan inklusif

¹² "Sensus Penduduk Indonesia 2010" (On-Line), tersedia di: <https://www.bps.go.id> (28 Maret 2019).

¹³ Isnurhadi, *Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*, (Tesis S2 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2013)

dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 50% dan Singapura yang mencapai 90%.¹⁴

Dalam rangka memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perlu adanya strategi khusus agar keuangan lebih inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Kegiatan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Di Indonesia Pada tanggal 18 November 2016, Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau disingkat dengan SNKI telah diluncurkan dan diiringi dengan target ambisius, Indeks Keuangan Inklusif ditargetkan menyentuh level 75%. SNKI adalah strategi Nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat tentang visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁶

Inklusi keuangan syariah (*sharia financial inclusion*) mengemban misi pengentasan kemiskinan bagi umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Mengentaskan kemiskinan bagi umat Islam artinya juga menurunkan secara signifikan tingkat kemiskinan di Indonesia. Islam sendiri memandang kemiskinan adalah masalah struktural, karena Allah telah menjamin rizki setiap

¹⁴ "Pidato G-20, Presiden Singgung Ekonomi Inklusif Lagi", (On-Line) tersedia di: <https://bisnis.tempo.com> (30 Maret 2019).

¹⁵ Peraturan Presiden No 28 Tahun 2016, (*Strategi Nasional Inklusi Keuangan*, 2016), h.1

¹⁶ *Ibid*, h. 2

mahluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 40:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِثْقَلًا مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”.¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan, bahwa Dia sendiri yang menciptakan kamu, memberi rezeki, Dia mengeluarkan bayi dari perut ibunya dalam keadaan telanjang, tidak berilmu, tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, tidak pula kekuatan. Kemudian Dia memberinya rezeki kesemua itu, juga perhiasan, harta benda, property dan usaha. Dia mematikan dan menghidupkan dan tidak ada satupun persembahan kaum musyrik (patung dan berhala) yang ikut serta dalam hal itu, mengapa mereka menyekutukan sesuatu yang tidak berkuasa apa-apa dengan Allah yang mengurus semua itu (mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan). Setiap mahluk yang Allah hidupkan pasti akan mendapatkan jaminan bagian dari rizkinya, oleh karena itu ketika kemiskinan menjadi masalah struktural, maka strategi pengentasannya pun harus sistematis, komperhensif dan institusional.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.328.

Menurut CGAP-GPFI (*Global partnership for Financial Inclusion*) financial inclusion merupakan keadaan di mana semua orang dewasa memiliki akses keuangan berupa kredit (pembiayaan), tabungan, pembayaran maupun asuransi dari lembaga keuangan formal. Meliputi penyediaan layanan keuangan yang kredibel, dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan, tanpa pengecualian secara finansial dalam memanfaatkan layanan keuangan formal daripada layanan keuangan yang informal. Dari data tahun 2014, indeks keuangan inklusif di Indonesia baru mencapai 36 persen. pemerintah mencanangkan peningkatan indeks ini ke level 75% pada tahun 2019.¹⁸ Ketika seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan *financial inclusion*, diharapkan kemiskinan yang ada dapat lebih banyak dihilangkan karena masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik dan terarah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan mengenai pentingnya literasi keuangan dalam membentuk keuangan syariah yang inklusif, maka pengoptimalan pemahaman yang benar mengenai keuangan syariah khususnya perbankan syariah kepada akademisi, ulama, dan masyarakat muslim akan berdampak signifikan bagi upaya literasi keuangan syariah. Sebaliknya, kedangkalan pengetahuan mereka, justru bisa menjadi *black campaign* terhadap gerakan keuangan syariah yang tengah digalakkan.

Bandar jaya adalah ibukota dari kabupaten Lampung Tengah yang dimana merupakan pusat perekonomian sangat pesat di kota tersebut, salah satunya yaitu pasar Plaza Bandar Jaya adalah pasar terbesar di Kabupaten Lampung

¹⁸ “5 Pilar Strategi Keuangan Inklusif” (On-Line), tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id> (30 Maret 2019).

Tengah yang terdapat banyak pedagang untuk menjual barang dagangannya dan beberapa komoditas yang diperjualbelikan. Oleh karena itu disekitar pasar tersebut terdapat banyak bank yang guna dapat menjadi sarana kelancaran dalam lalulintas pembayaran maupun dalam penambahan modal para pedagang. Namun, dari sekian banyaknya bank yang ada di pasar tersebut, sangat sedikit lembaga keuangan syariah yang ada, khususnya bank syariah di pasar tersebut.

Saat ini bank syariah yang bukan hanya sebagai usaha bisnis semata, ditekankan untuk mengedukasi masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Seperti contoh Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya telah melakukan edukasi kepada masyarakat di pasar Plaza Bandar Jaya yang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Hal tersebut dilakukan karena menurut pihak BSM masih banyaknya masyarakat awam yang belum mengetahui akan bank syariah dan produk-produk apa saja yang ada di bank syariah tersebut. Oleh karena itu, masih sedikit para pedagang yang menggunakan jasa dari perbankan syariah akibat dari ketidaktahuan akan pentingnya literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya.

Berikut adalah jumlah nasabah pembiayaan dan DPK perbulan bank syariah mandiri KC Bandar Jaya dalam tahun 2018:

Tabel 1.1

Jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya Januari-Desember 2018

| No | Bulan | DPK | Pembiayaan |
|----|-----------|-------|------------|
| 1 | Januari | 749 | 115 |
| 2 | Februari | 375 | 87 |
| 3 | Maret | 1.089 | 89 |
| 4 | April | 362 | 93 |
| 5 | Mei | 984 | 105 |
| 6 | Juni | 186 | 62 |
| 7 | Juli | 517 | 78 |
| 8 | Agustus | 405 | 92 |
| 9 | September | 537 | 146 |
| 10 | Oktober | 450 | 59 |
| 11 | November | 359 | 71 |
| 12 | Desember | 256 | 82 |

Sumber data : Data Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

Berdasarkan data diatas, ada keterkaitan antara dilakukannya edukasi dan sosialisasi oleh Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya tentang perbankan syariah kepada para pedagang dalam penggunaan jasa bank syariah. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak pedagang yang tidak paham akan perbankan syariah, oleh karena itu menjadi alasan tidak menggunakan produk-produk di bank syariah. Banyaknya UMKM di pasar tersebut sehingga dapat menjadi peluang Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya untuk meningkatkan

nasabah dengan diedukasinya dan disosialisasikannya produk-produk perbankan syariah agar masyarakat paham mengenai perbankan syariah, dan tentu akan berpengaruh pada pemilihan produk jasa bank yang ada.

Dari permasalahan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISIS SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH OLEH BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *SHARIA FINANCIAL INCLUSION* (Studi pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya)”**.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu penulis berfokus pada penelitian tingkat literasi keuangan syariah dan keterkaitan tingkat literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada pedagang. Penelitian dilakukan di pasar Plaza Bandar Jaya.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola sosialisasi literasi keuangan syariah pada pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya?
2. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya?
3. Bagaimana peran literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan *sharia financial inclusion* pada pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola sosialisasi literasi keuangan syariah pada pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat literasi keuangan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya.
3. Menganalisis peran literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya.

G. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan bagi pribadi peneliti. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat pula menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis dan dapat menjadi bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.
- b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah.
- c. Bagi Perbankan, sebagai bahan masukan dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan, guna meningkatkan kerja perbankan, dan juga sebagai bahan koreksi untuk pihak perbankan agar lebih luas lagi pangsa pasar perbankan syariah pada masa yang akan datang.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau

perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi peneliti berikutnya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.¹⁹ Sedangkan menurut Usman Rianse, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.²⁰ Sedangkan John W. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha membangun makna suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan.²¹ Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memaparkan atau menginterpretasikan suatu fenomena yang dilakukan oleh partisipan (objek penelitian) berdasarkan teori ilmiah yang ada. Sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang konkret terhadap praktik dari teori yang sudah ada.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5.

²⁰ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, cet. iii, 2012), h. 9.

²¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terjemahan Achmad Fawaid dari judul aslinya *Research Design, Qualitative, and Mixed Methods Approach* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ii, 2012), h. 28.

2. Sumber Data

a. Sumber primer, yaitu:

Data-data primer menurut Supranto yaitu:²² data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya, yakni data yang didapatkan peneliti dari hasil tes dan angket dengan pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya, serta wawancara dengan informan dari pihak Bank Mandiri Syariah KC Bandar Jaya. Selain itu data primer dalam penelitian ini juga didapatkan dari jurnal-jurnal keilmuan yang dianggap reliabel oleh peneliti.

b. Sumber sekunder, yaitu:

Data sekunder yaitu:²³ data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti dengan metode penulisan kualitatif ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul, mengambil karya atau tugas akhir yang sudah ada sebelumnya dan memiliki tema yang berkaitan, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Tugas Akhir yang peneliti lakukan, serta dokumen-dokumen yang relevan.

²² Johannes Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 20-21.

²³ Christine Daymon, *Qualitatif Riset in Public Relation and Marketing Communication*, Terjemahan Rhenald Kasali.. (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), h. 20.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Sebuah populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.²⁴ Atau populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak terhingga. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar Plaza Bandar Jaya dengan data tercatat hingga 2018 sebanyak 1700 pedagang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu objek atau subyek yang mewakili populasi. Dalam menetapkan besarnya sampel (sampel size) dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut.²⁵

$$n = \frac{N}{2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi yaitu pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, sebanyak 10%.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari data pasar Plaza Bandar Jaya hingga tahun 2018 adalah :

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 215.

²⁵ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 146.

$$n = \frac{\text{---}}{(\text{ , })}$$

$$= 94,44$$

dengan demikian, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 94 pedagang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan, atau bisa juga disebut observasi pasif.²⁶

b. Wawancara

Wawancara atau interviu (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Yaitu menghimpun data fisik terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-Jenis Penelitian*, Cet III (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 220.

²⁷ *Ibid*, h. 216.

d. Mendistribusikan Angket

Informan penelitian ini adalah pedagang di pasar Plaza Bandar Jaya, pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *stratified random sampling*.²⁹ Data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Angket digunakan untuk memperoleh data literasi keuangan syariah, penggunaan perbankan syariah serta *financial inclusion* pada pedagang. Angket yang digunakan berupa angket tertutup. Jumlah informan yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 94 responden, yang diharapkan dapat mewakili populasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

Organizing : Yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah penelitian ini.

Editing : Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan data yang lainnya.

Analyzing : Yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan kualifikasikan menurut metode analisis yang

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, cet v 2015), h. 151.

sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁰ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³¹

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 143.

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 63.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia sosialisasi adalah usaha mengubah milik perseorangan menjadi milik umum.¹ Berikut pendapat para ahli tentang sosialisasi antara lain:

Carlote Buehler, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Bruce J. Cohen, mendefinisikan sosialisasi sebagai prosesproses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.

Karel J. Veeger, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses belajar mengajar, melalui individu belajar menjadi anggota masyarakat, di mana prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada

¹Hamzah Samsuri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern,(Surabaya: Greisinda Press Surabaya, 2006), h.544.

individu, tetapi juga individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya.

Robert M.Z. Lawang, sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Sitorus, sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan 12 nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagaimana anggota masyarakat dan sebagai individu (pribadi).²

Jadi sosialisasi adalah sebagai suatu proses yang membantu individu melalui proses belajar dan penyesuaian diri agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya dalam bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadinya.

2. Manfaat Sosialisasi

- a. Meningkatnya status yang seringkali diikuti dengan meningkatnya kepercayaan dan meningkatnya kepercayaan peranan sosial di lingkungan sosial yang baru.
- b. Terintegrasi secara kuat dengan masyarakat setempat dalam setiap aktifitas yang ditandai dengan keakraban dan persaudaraan diantara individu tersebut dengan masyarakat lain.

²Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Cet. Ke-3 (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 155.

- c. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya.

3. Tahapan-Tahapan Dalam Sosialisasi

Tahap-Tahap Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu:³

1. Sosialisasi Primer, yaitu sosialisasi yang pertama dijalankan individu semasa kecil, yang harus dijalannya apabila dia akan menjadi anggota masyarakat. Dalam hal ini keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi.
2. Sosialisasi Sekunder, yaitu proses yang dialami individu yang telah disosialisasikan ke dalam sector baru dari dunia objektif masyarakatnya. Lembaga pendidikan dan lembaga lain diluar keluarga merupakan agen sosialisasi sekunder.

B. Literasi Keuangan Syariah

1. Pengertian Literasi Keuangan

Ilmu keuangan merupakan suatu ilmu yang praktiknya melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi umat muslim, keuangan syariah merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki oleh tiap individu agar memudahkan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dan efektif dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan juga dalam memanfaatkan produk keuangan syariah yang ada. Menurut Chen dan Volpe literasi keuangan adalah

³Hendi Suhendi & Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 100.

kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang.⁴

Menurut Garman & Forgue literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat kedalam perilaku.⁵ Menurut Mitchell, literasi keuangan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi yang diperoleh dan membuat keputusan untuk perencanaan keuangan, pensiun, dan hutang.⁶ Sedangkan menurut Mason dan Wilson literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengambil keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkan. Literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan dalam memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan agar hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwasannya misi penting dari program literasi keuangan adalah

⁴Chen, H.& Volpe, R. P., "An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students". *Financial Journal*, 1998, h.107.

⁵E. Garman Thomas, Forgue Raymond E, *Personal Finance International Edition (Canada: South Western Cengage Learning, 2010)*, h.4.

⁶ Lusardi, A & Mitchell, O.S. "BabyBoomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth". *Journal of Monetary Economics*, 2007, h. 224.

untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya literasi keuangan masyarakat tidak hanya mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan tetapi masyarakat juga mampu menggunakan serta memperbaiki pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan ekonomi.

2. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Berbeda dengan literasi keuangan secara konvensional, literasi keuangan syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan secara syariah. Literasi keuangan atau melek keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber keuangan untuk mencapai kesejahteraan.⁷ Dalam konteks literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa melek keuangan syariah berarti konsumen produk dan jasa keuangan syariah atau masyarakat luas diharapkan tidak hanya sebatas mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan syariah melainkan masyarakat mampu memahami serta menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah sebagai langkah merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini sejalan

⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/ 2014

dengan tujuan pembangunan literasi keuangan syariah yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam yaitu larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian), dan larangan *maysir* (perjudian).⁹ Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya. Dengan lebih dari 220 juta jiwa di Indonesia beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam terbesar di dunia dan memiliki potensi yang besar di bidang keuangan Islam.¹⁰

Sistem ekonomi Islam sudah semestinya diterapkan secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 208 yang berbunyi:

⁸ Rahim, Siti Hafizah Abd, Rashid Rosemaliza Ad, dan Hamed, Abu Bakar, *Factor Analysis of Islamic Financial Literacy and Its Determinan: A Pilot Study, International Soft Science Conference (ISSC)*, 2016

⁹ Antara, Purnomo M., Musa, Rosidah, dan Hassan, Faridah, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy : The Way Forward in Hala Ecosystem*, (Fifth International Conference On Marketing And Retailing (5th INCOMar) 2015, Procedia Economics and Finance 37, 2016), h. 199.

¹⁰ Lackman, Bedi Grunter, *The Six Key Countries Driving Global Islamic Finance Growth, Research Assosite, Nomura Institute Of Capital Markets Research*, h.8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.¹¹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bersama bahwa sebagai seorang muslim di anjurkan untuk menerapkan Islam secara keseluruhan, kaitannya dengan hal ini adalah dalam permasalahan ataupun kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Dengan menerapkan sistem ekonomi syariah tentunya seseorang akan memiliki landasan yang kokoh sekaligus untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan sistem Islam.¹²

Perilaku keuangan merupakan gambaran tentang bagaimana seorang individu dalam berperilaku ketika dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus dibuat. Prilaku keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai implementasi yang didasarkan atas ilmu hukum syariah. Jadi setiap individu harus dapat mengelola keuangan pribadinya dengan cara membangun melek financial yang mengarah pada prilaku keuangan yang sehat dan sesuai dengan tuntunan hukum syariah sekaligus juga mematuhi apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi Islam.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h.40.

¹²Penelitian Rike Setiawan, “*Literasi Keuangan Islam*” (Telaah Literatur), h.9.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip dasar syariah yang kemudian akan bermanfaat bagi keuangan dimasa mendatang.

3. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai prinsip keuangan Islam dan juga implementasinya pada lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan syariah. Dengan tingkat literasi keuangan yang baik maka diharapkan dapat membantu seseorang dalam proses pengambilan keputusan keuangan sehingga tujuan dan perencanaan keuangan dapat tercapai secara maksimal.

Pada dasarnya antara seorang individu dengan lembaga jasa keuangan syariah tentu saling membutuhkan, sehingga makin tinggi tingkat literasi keuangan syariah maka semakin banyak orang yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan di peroleh akan semakin besar. Dalam prinsip ekonomi syariah, literasi keuangan syariah memberikan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:¹³

¹³ “Literasi Keuangan” (On-Line), tersedia di: <http://www.ojk.go.id> diakses pada 26 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB

1. Dengan adanya literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seorang individu maka akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah.
2. Semakin banyak orang menabung dan melakukan kegiatan investasi secara syariah maka diharapkan kegiatan ekonomi akan berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba atau bunga, maysir (spekulasi), dan juga tadlis (penipuan).

4. Aspek-Aspek Literasi Keuangan

Dalam literasi keuangan terdapat beberapa aspek keuangan menurut Chen dan Volpe yang memungkinkan seorang individu untuk mengoptimalkan atau menerapkan literasi yang dimiliki secara maksimal. Aspek inilah yang akan membantu individu dalam perencanaan keuangan yang sehat dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut:¹⁴

a) *Basic Personal Finance* (Pemahaman Dasar Keuangan)

Dalam basic personal finance mencakup berbagai pemahaman dasar seseorang dalam suatu sistem keuangan, yakni bagaimana seorang individu mengatur pendapatan dan pengeluaran serta memahami konsep dasar keuangan, seperti:

¹⁴Nababan D, Sadalia, *Analisis Personal Literacy Dan Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera utara* (Sumatera Utara, 2012).

a) Nilai pendapatan bersih

Pendapatan bersih merupakan ukuran bagi kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi total aset dengan jumlah total utang. Jika hasil tidak menunjukkan angka minus, berarti keuangan berada dalam kondisi aman. Jika tidak, berarti keuangan dalam kondisi rawan dan mungkin butuh strategi untuk memperbesar pemasukan.

b) Likuiditas

Likuiditas menurut kamus keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar.

c) Toleransi resiko

Toleransi resiko adalah ukuran ketidakpastian yang bersedia diterima oleh seorang investor atau pengusaha sehubungan perubahan negative terhadap bisnis atau aset.

d) Alokasi aset

Alokasi aset diartikan sebagai tempat dimana akan menyimpan uang, tergantung pada kebutuhan individu maupun perusahaan. Bisa dengan membeli tanah, rumah atau apapun.

e) Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat.

b) ***Money Management (Pengelolaan Keuangan)***

Pengelolaan keuangan mempelajari bagaimana seorang individu mengelola keuangan pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman mengenai literasi keuangan maka semakin baik pula individu tersebut dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Konsep *money management* mencakup bagaimana setiap individu dalam menganalisis keuangan pribadi mereka. Dalam hal ini individu diarahkan tentang bagaimana menggunakan dana, menentukan sumber dana, memahami resiko apa yang akan terjadi, menyusun anggaran dan membuat prioritas penggunaan dana yang tepat sasaran.

c) ***Saving And Investment (Tabungan Dan Investasi)***

Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi. Penghasilan Sedangkan investasi adalah bagian dari pendapatan yang dipergunakan untuk kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. Investasi merupakan penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi

secara professional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang berupa *capital gain/loss* dan *yield*. Alasan seseorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi:

1. Investasi tetap bisnis yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Investasi redensial yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Investasi persediaan yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi.

d) *Risk Management* (Manajemen Risiko)

Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat dari adanya suatu ketidakpastian. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh individu untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi, yakni dengan menjalankan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yang bertujuan untuk mengelola resiko sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau

memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Terdapat 3 proses dalam manajemen risiko, yaitu:¹⁵

1. Identifikasi risiko

Dalam proses ini terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi mengenai risiko apa saja yang kemungkinan besar akan terjadi. Caranya yakni dengan menelusuri sumber-sumber risiko sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Evaluasi dan pengukuran risiko

Tujuan dari dilakukannya evaluasi adalah supaya karakteristik risiko dapat dipahami dengan baik. Setelah evaluasi dilakukan langkah selanjutnya yakni melakukan pengukuran risiko, yaitu dengan memahami seberapa besar risiko yang mungkin akan dihadapi sehingga kita dengan mudah melakukan rencana penanggulangan risiko.

3. Pengelolaan risiko

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara membuat rencana penanggulangan resiko. Langkah yang dilakukan yakni dengan memisahkan ataupun menggolongkan risiko berdasarkan besar atau kecilnya keuntungan atau kerugian yang akan dihadapi. Ketika

¹⁵Zahroh, Fatimatus, *Menguji Tingkat Pengetahuan keuangan, Sikap Keuangan Pribadi, dan Perilaku Keuangan Pribadi Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Semester 3 dan Semester 7*. (Tesis,Undip, 2014).

pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan baik maka diharapkan hasilnya pun akan optimal.

5. Tahapan Dalam Perencanaan Keuangan

Ada beberapa tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan yang perlu dilakukan agar tujuan keuangan terwujud dengan baik, yaitu:

a. Evaluasi keuangan pribadi

Dimulai dengan memeriksa kesehatan keuangan yang terjadi saat ini. Hal ini termasuk pemeriksaan terhadap pengeluaran dan pemasukan yang telah terjadi. Seperti untuk apa saja uang dikeluarkan, seberapa banyak, dan juga pendapatan yang diperoleh sudah seimbang atau belum.

b. Penetapan tujuan keuangan

Menetapkan tujuan keuangan baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang dengan mencatatnya dalam sebuah buku khusus pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini dilakukan supaya manajemen keuangan dapat berjalan dengan baik dan tujuan keuangan dapat tercapai secara maksimal.

c. Penentuan strategi investasi

Penentuan strategi investasi dilakukan ketika seseorang sudah melakukan perencanaan anggaran dengan baik. Hal ini dilakukan dengan memilih jenis investasi yang memungkinkan untuk diterapkan dan tentunya dengan menyesuaikan keadaan keuangan dan juga kebutuhan akan investasi.

d. Implementasi rencana keuangan

Penerapan rencana keuangan yang baik akan memudahkan seseorang dalam mendisiplinkan diri saat melakukan pengelolaan keuangan. Hal ini bermanfaat supaya kondisi keuangan mengalami peningkatan di masa depan baik bagi diri sendiri maupun keluarga secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.

e. Meninjau, mengevaluasi, dan merevisi rencana keuangan

Hal ini dilakukan ketika 4 poin diatas telah dilakukan, yakni melakukan peninjauan ulang terhadap perencanaan pengelolaan keuangan apakah sudah terealisasi dengan baik atau belum.

7. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Literasi Keuangan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pada tingkat literasi keuangan seseorang. Perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan pada tiap individu dalam pengumpulan asset dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat literasi seseorang, yaitu:

a. Jenis kelamin

Dalam hal pengelolaan keuangan jenis kelamin merupakan hal yang juga sangat berpengaruh. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwasannya tingkat literasi keuangan laki-laki jauh lebih baik dari pada tingkat literasi keuangan pada perempuan. Laki-laki dianggap lebih pandai dalam mengelola keuangan karena laki-laki akan

mengutamakan fikiran nya dalam pengambilan keputusan keuangan, sedangkan perempuan lebih menutamakan sikap emosional dalam kegiatan konsumsi. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki lebih mampu mengontrol dirinya dalam melakukan kegiatan konsumsi. Laki-laki lebih mandiri secara finansial dan lebih percaya diri dalam pengelolaan keuangan dibandingkan dengan perempuan.¹⁶

Dalam penelitian Chen dan Volpe, membuktikan bahwa laki-laki lebih memahami *financial literacy* dari pada perempuan. Namun jika melihat pada penelitian Khrisna membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan laki-laki lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat literasi perempuan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan investasi, kredit, dan juga asuransi. Penelitian Siti Hafizah dan Abdul Rahim juga menemukan bahwasannya tingkat literasi keuangan syariah laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.¹⁷ Sementara itu dari uraian tersebut terlihat bahwa perbedaan antara tingkat literasi keuangan antara laki-laki dan perempuan tidak sama.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Adalah salah satu alat ukur prestasi dibidang akademik atau pendidikan.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terdiri dari mahasiswa dengan IPK tinggi

¹⁶ Yohanes Sutrisno, "*Financial Attitudes And Spending Habits Di Kalangan Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin*", Tesis Universitas Kristen Satya Wacana, 2002.

¹⁷ Siti Hafizah dan Abdul Rahim, *Psychosocial Factors And Gender Influencing The Level Of Islamic Financial Literacy*, http://etd.uum.edu.my/4129/7/s814567_pdf, diakses pada tanggal 25 Juni 2019.

(3,00-4,00) dan rendah (2,99). Dengan adanya perbedaan IPK mahasiswa maka akan menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa. Sehingga diharapkan semakin tinggi IPK mahasiswa maka akan semakin baik pula pengetahuannya terutama tentang pengelolaan keuangan. Menurut Agustin, tingkat kemampuan akademik mahasiswa mempengaruhi nilai literasi keuangan mahasiswa dimana semakin tinggi tingkat kemampuan akademik maka semakin tinggi pula nilai literasi keuangan.¹⁸

c. Status pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah profesi yang disandang seseorang dalam melakukan aktifitas yang memberikan hasil baik berupa pengalaman atau materi yang dapat menunjang kehidupannya. Menurut Chen dan Volpe mahasiswa dengan pengalaman kerja yang kurang memiliki probabilitas yang rendah karena minim dalam hal pengetahuan dan pengalaman terkait masalah keuangan dibandingkan dengan yang memiliki banyak pengalaman kerja.¹⁹

Terdapat 2 kategori dalam status pekerjaan mahasiswa, yakni ada yang sudah memiliki pekerjaan dan ada yang belum. Mahasiswa yang sudah bekerja tentu diharapkan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik daripada mahasiswa yang belum bekerja. Hal ini disebabkan karena

¹⁸Agustin, “*Literasi Keuangan Pada Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Keuangan STIE Perbanas Surabaya*”, 2012, Skripsi STIE Perbanas Surabaya.

¹⁹Chen, H.& Volpe, R. P., “An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students”, *Journal of Financial Services*, 1998, h.107.

mahasiswa yang sudah bekerja tentu memiliki banyak pengalaman tentang pengelolaan keuangan pribadinya.

d. Usia

Menjalankan dunia bisnis membutuhkan skill dan kematangan usia yang cukup. Diusia produktif para pelaku bisnis dapat maksimal dalam menjalankan usaha. Untuk menjalankan usaha dengan maksimal maka para pelaku usaha harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang literasi keuangan supaya dapat mengelola keuangan usaha dengan baik. Margaretha dan Pambudhi dalam penelitiannya mengenai tingkat literasi keuangan mengemukakan bahwa²⁰, usia memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan. menjelaskan mengenai usia diduga memiliki korelasi yang positif dengan literasi keuangan karena semakin tinggi usia seseorang maka semakin banyak pengalamannya. Usia seseorang mengindikasikan banyaknya pengalaman yang diperoleh seseorang semasa hidupnya termasuk pengalamannya dalam masalah keuangan sehingga semakin berpengalaman maka pengambilan keputusan keuangannya akan semakin baik juga.

²⁰ Margaretha, Farah., Dan Pambudhi, R. A. "Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi". (*Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 17, No. 1, 2015), h. 76-85.

e) Tempat tinggal

Keown menemukan bahwa²¹ seseorang yang tinggal sendiri cenderung memiliki tingkat literasi keuangan pribadi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal dengan suami istri atau orang tua karena mereka yang tinggal sendiri dapat dengan semata-mata bertanggung jawab dalam penggunaan transaksi keuangan dan keputusan keuangan yang dia lakukan dari hari ke hari. Seseorang yang tinggal dalam komunitas, perguruan tinggi atau organisasi keislaman akan lebih mengetahui mengenai tentang literasi keuangan syariah dibanding dengan seseorang yang tinggal di daerah masyarakat sekitar non muslim.

f) Pendidikan

Maulani dalam penelitiannya mengenai tingkat literasi keuangan mengemukakan bahwa, terdapat pengaruh pendidikan orang tua terhadap literasi keuangan. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu uang dan keuntungan yang diperoleh oleh individu akan semakin besar dan akan meningkatkan taraf kehidupannya pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan literasi finansial baik pendidikan informal di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal di lingkungan perguruan

²¹ *Ibid*, h. 17.

tinggi. Terdapat hubungan literasi keuangan dan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan merupakan hal yang penting untuk memprediksi tingkat literasi keuangan. tingkat literasi keuangan berbeda antara lulusan pasca sarjana, sarjana, atau yang hanya setingkat SMA.²²

7. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan akan berjalan dengan baik apabila telah diterapkan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengimplementasikan nya yaitu dengan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dan menggunakan produk dan jasa keuangan yang telah disediakan oleh lembaga tersebut. Beberapa indikator yang masuk ke dalam literasi keuangan syariah adalah, sebagai berikut:²³

a. Pengetahuan Umum Keuangan Syariah

Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan.²⁴

Dalam Ekonomi Islam segala bentuk kegiatan yang tidak didasarkan pada prinsip Ekonomi Islam hanya akan mendatangkan keuntungan sesaat dan menimbulkan banyak kerugian. Sebagai seorang muslim sudah

²² Maulani, Septi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan”. Skripsi Diterbitkan, Jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016)

²³ Herdianti IF, “Analisis tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa non ekonomi serta pengaruhnya terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah”, (Skripsi universitas muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

²⁴ S.P.Wagland, and Taylor, S., “When it comes to financial literacy is gender really an issue” *Australian Accounting Business and Finance Journal* , Vol 3, No. 1 (Mei 2009), h.16.

semestinya memiliki pengetahuan yang baik terutama dalam hal keuangan Islam, apa saja yang dilarang dalam kegiatan ekonomi dan apa saja yang harus dilakukan. Seperti pelarangan riba karena dianggap haram dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.²⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas Ibnu Katsir menafsirkan yakni takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian, dan tinggalkan harta yang ada ditangan orang lain berupa kelebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba, serta lainnya. Imam Ar-Razi memberikan beberapa alasan mengapa Islam melarang penerapan sistem bunga, yakni: merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, serta

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.

yang telah memiliki kekayaan akan semakin kaya dan begitu pula sebaliknya.²⁶

b. Tabungan Syariah

Tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau dengan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro atau lainnya.²⁷

Tujuan dari melakukan simpanan adalah supaya seorang individu memiliki keuangan yang baik dalam jangka panjang. Tujuan melakukan simpanan dalam bentuk tabungan adalah kemudahan dalam hal penarikannya serta harapan untuk memperoleh bonus yang lebih besar dari simpanan dalam bentuk giro. Dengan pengelolaan yang baik, tabungan akan memberikan manfaat yang banyak di masa mendatang. Misalnya saja untuk keperluan mendesak yang membutuhkan banyak dana. Dengan

²⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Semarang: Mediakita, 2011), h. 2011

²⁷ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), h.88.

adanya tabungan kita akan terhindar dari sifat konsumsi yang berlebihan atau boros, baik dalam hal konsumsi barang primer, sekunder, maupun tersier.

Berikut ini, terdapat ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan sifat pemborosan, yaitu: (QS. Al-Isra,17: 26-27) :

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang namanya tabdzir (pemborosan) adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Penggunaan harta secara berlebihan atau boros merupakan hal yang sia-sia sama seperti sebuah kebatilan. Dan hal inilah yang harus kita hindari sebagai umat muslim. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabdanya:

²⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.

ان رَضِيَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكَرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَنَنْتَعِصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَكَرَهُ لَكُمْ قِلَ الْوَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَالْمَالِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan (Allah ridla) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.” (HRMuslim no.1715).²⁹

c. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, yaitu insurance yang di artikan sebagai pertanggungan. Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko agar kerugian yang di alami individu dapat diperkirakan dengan mudah. Asuransi syariah di artikan sebagai pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam AlQur'an dan hadits.³⁰ Dalam Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat di artikan sebagai

²⁹ “Hidup Boros Temannya Setan”, (on-line) tersedia di: <https://www.rumasyo.com> (20 November 2019).

³⁰ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.2.

perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.³¹

Asuransi menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu antara dua belah pihak atau lebih dimana pihak penanggung terikat dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab pihak hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Willet et.al mendefinisikan asuransi sebagai konsep pengumpulan resiko dan peran kelompok untuk ikut menanggung kerugian. Dengan asuransi yang dilakukan tentu akan melindungi diri sendiri dan keluarga dari berbagai risiko yang berdampak secara finansial seperti: kecelakaan, penyakit, kematian, dan tuntutan lainnya.

Menurut Nikmatullah asuransi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem atau tindakan dimana di dalamnya terdapat suatu perlindungan atau ganti rugi keuangan untuk jiwa, properti,

³¹ Hendi Suhendi, Deni K, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h.1.

kesehatan, dan lainnya.³² Adapun asuransi menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabbaru' melalui akad yang sesuai dengan syariah.

d. Investasi Syariah

Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar dimasa mendatang.³³ Investasi juga dapat diartikan sebagai menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau data tersebut.

Dalam Ekonomi Islam, investasi syariah diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip keislaman dengan konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan agama islam.

³² Nikmatullah Zuhri, Rahmatullah Akbar, *Ibu Menteri Keuangan Keluarga* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h.79.

³³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.138.

Landasan investasi terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah

(2) ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan perlipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridaan-Nya. Setiap amal kebaikan itu dilipatgandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat, sampai kepada tujuh ratus kali lipat. Orang yang mengeluarkan nafkah (perbelanjaan) di jalan Allah, lalu ia tinggal di dalam rumahnya, maka baginya dari setiap dirham (yang telah dibelanjakannya) menjadi tujuh ratus dirham di hari kiamat. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu ia membelanjakan hartanya untuk tujuan itu, maka baginya setiap dirham (yang telah dibelanjakannya menjadi) tujuh ratus ribu dirham.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 34.

Contoh nyata dari kegiatan investasi yang dimulai dengan *habatin wahidatin* (sebutir benih) menjadi tujuh butir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Secara tidak langsung, Al-Qur'an telah memberikan panduan dalam hal berinvestasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq, yang berdimensi *ukhrawi*), namun bila banyak orang yang melakukan infaq maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang miskin untuk dapat berproduktivitas kearah atau tujuan yang jauh lebih baik. Inilah sebabnya *multiplier effect* dari infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun mempengaruhi dimensi duniawiyah.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).³⁵

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁶

³⁵ M. Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

³⁶ Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: CV.Widya Karya, 2008), h. 75.

Pengertian bank syariah atau bank islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur'an dan hadist.³⁷

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktikpraktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.³⁸

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Landasan Hukum Al-Qur'an

Berbeda dengan bank konvensional yang setiap sistem transaksi tidak ada landasan hukum selain hukum positif, salah satu landasan hukum tentang bank syariah dalam Al-Qur'an adalah Q.S An-Nisa ayat 29:

³⁷ Edy, Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 33.

³⁸ *Ibid.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Berdasarkan ayat diatas, dapat diartikan bahwa bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dalam ajaran islam (batil), yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan serta haruslah saling tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan.

b. Landasan Hukum Positif

1. Undang-Undang

Pada awalnya landasan hukum operasional bank dengan sistem bagi hasil hanya dikategorikan sebagai “bank dengan system bagi hasil” tidak terdapat rincian landasan hukum bank syariah serta jenis yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut, pembahasan perbankan

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.65.

dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas dan merupakan sisipan belaka. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara jelas di sebut tentang operasional bank syariah. Dimana prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).⁴⁰ Akan tetapi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah menjadi landasan hukum Perbankan syariah di Indonesia. Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

2. Peraturan Bank Indonesia

PBI No 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta

⁴⁰ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 Ayat (13)

Pelayanan Jasa Bank Syariah, latar belakang diterbitkannya ini adalah Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan maka diperlukan satu pemahaman yang sama dari seluruh stakeholder mengenai keberadaan, bentuk kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah. Perbankan Syariah walaupun memiliki karakteristik tersendiri, tetap merupakan salah satu bagian dalam sistem perbankan nasional sesuai sistem perbankan yang dianut di Indonesia yaitu dual banking system. Dengan demikian, kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa berdasarkan Akad Syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan jasa perbankan.

Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

PBI Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/Dpbs dengan pokok dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mekanisme Pengeluaran Produk Bank baru ada 2 (dua), yaitu :
 - a. pelaporan, untuk Produk yang memiliki karakteristik yang sama dengan Produk dalam buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, dan
 - b. Persetujuan, untuk Produk yang memiliki karakteristik yang tidak sama dengan Produk dalam buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.
- 2) Adanya persyaratan dan dokumen dalam rangka penyampaian laporan atau permohonan persetujuan antara lain:
 - a. pencantuman kata "iB" pada nama Produk
 - b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
 - c. pendapat Dewan Pengawas Syariah;
 - d. prosedur pelaksanaan;
 - e. analisa manajemen risiko; dan
 - f. draft akad.
- 3) Jenis produk dalam buku Kodifikasi Produk diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:
 - a. Penghimpunan Dana antara lain Giro Syariah, Tabungan Syariah, dan Deposito Syariah.

- b. Penyaluran Dana antara lain Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qardh, serta Pembiayaan Multijasa.
 - c. Pelayanan Jasa antara lain L/C Impor Syariah, Bank Garansi Syariah, dan Penukaran Valas.
- 4) Masing-masing produk ini dijabarkan dengan elemen-elemen antara lain definisi, akad, fitur dan mekanisme, tujuan/manfaat, analisis dan identifikasi risiko, fatwa syariah, referensi, perlakuan akuntansi, serta berlaku bagi jenis bank apa saja.

PBI No.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang

disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan

kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK.⁴¹

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai J 2019, DSN MUI telah mengeluarkan 129 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Giro, Tabungan, Deposito, Mudharabah, Murabahah, dan lain sebagainya.

Fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi masa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu, negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian

⁴¹ “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya” (On-Line), tersedia di: <http://www.ojk.go.id> diakses pada 20 November 2019 Pukul 20.00 WIB

diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- a. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- b. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI
- c. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI
- d. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴²

3. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU. No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana, menyalurkan dana, dari masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dan social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syariah, h.80

wakaf (*nashir*) sesuai dengan pemberi wakaf (*wakif*). Bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:⁴³

a. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*sahibul mal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para banker yang bekerja di bank (bukan banker syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

⁴³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang, Akademia Permata, 2002), h. 70.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip ujah (*murabahah*, *salam* dan *salam parallel*, *istishna* dan *istishna parallel*) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. Penerima pendapatan dan kualitas aktivitas produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung *mudharabah*). Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi syariah sebagai manajer investasi.

c. Fungsi Sosial

Fungsi ini adalah sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu instrument Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument *qardhul hasan*. Instrument ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal

serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, dan lain-lain. Hanya saja yang diperhatikan adalah prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah juga menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Jasa yang ditawarkan oleh bank syariah berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbal bagi hasil atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya meliputi *letter of credit*, *wire transfe*, *letter of guarante* dan lain-lain.

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan dan sebagai lainnya.

Namun, perbedaan utama antara perbankan syariah adalah larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah. Dalam islam riba apapun jenisnya diharamkan, sedangkan jual beli (*murabahah*) dan kemitraan kerja sama

(*mudharabah, musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil dihalalkan. Syari'i

Antonio mendefinisikan sebagai berikut:⁴⁴

Tabel 2.1
Pebedaan Bank Syariah dan Konvensional

| Bank Syariah | Bank Konvensional |
|---|--|
| Melakukan investasi yang halal-halal saja | Investasi halal dan haram |
| Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli, dan sewa menyewa | Memakai prangkat bunga |
| Profit dan falah oriented | Profit oriented |
| Hubungan nasabah dengan bank dalam bentuk kemitraan | Hubungan nasabah dalam bentuk debitur kreditur |
| Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa dewan Pengawas Syariah (DPS) | Tidak terdapat dewan sejenis |

Sumber: Antonio, M. Syafi'I (2001:34)

Dari tabel di atas, perbedaan pertama yaitu hukum yang digunakan. Bank syariah memiliki sistem yang didasari pada syariat islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa Ulama (Majelis Ulama Indonesia), sementara bank konvensional memiliki sistem yang hanya dilandasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan kedua pembagian keuntungan, bank konvensional menrapkan sistem bunga. oleh karena itu, bank konvensional menganggap bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah akan selalu untung. Pada bank syariah, keuntungan dari penggunaan modal dibagi sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Bank syariah akan tetap memperhatikan kemungkinan untung atau rugi

⁴⁴ M. Syafi'I Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34.

usaha yang dibiayainya tersebut. Jika dirasa tidak menguntungkan, bank syariah akan menolak pengajuan pinjaman.

Perbedaan ketiga yaitu perbedaan orientasi-orientasi yang ada pada sistem bank konvensional semata-mata adalah orientasi keuntungan atau profit oriented. Sementara pada sistem bank syariah, orientasi yang digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat atas kerjasamanya.

Perbedaan keempat hubungan nasabah dan bank dari segi sosial, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga terdapat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Pada bank syariah diterapkan sistem kemiraaan, sementara bank konvensional hubungan nasabah dan bank disebut kreditur dan debitur.

Perbedaan terakhir yaitu pengawasan setiap sistem transaksi yang dilakukan bank syariah harus dibawah pengawasan Dewan Pengawas. Dewan pengawas ini berisi sekumpulan ulama dan ahli ekonomi yang menguasai pemahaman *fiqh muamalah*. Sementara di bank konvensional setiap sistem transaksi tidak diawasi selalu oleh hukum positif.

5. Produk dan Jasa Bank Syariah

a. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

1) Pendanaan dengan Prinsip Wadiah

a) Giro wadiah

Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.⁴⁵

b) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadiah tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁴⁶

2) Pendanaan dengan Prinsip Qardh

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu nasabah dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya.⁴⁷

⁴⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 3, hlm. 113

⁴⁶ *Ibid*, h. 115.

⁴⁷ *Ibid*, h. 116.

3) Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah

a) Tabungan Mudharabah

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib mal) untuk diusahakan.

b) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah at muthlaqah*. Dalam *mudharabah at muthlaqah* bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya.

c) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al muqayyadah*. Dalam *mudharabah al muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi

hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek yang dipilih.

b. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*).⁴⁸

c. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebankan biaya administrasi.⁴⁹ Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan harus dilakukan pada

⁴⁸ *Ibid*, h. 123.

⁴⁹ *Ibid*, h. 127.

waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.⁵⁰

D. Sharia Financial Inclusion

1. Definisi Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan terdiri dari dua kata utama, yaitu inklusi dan keuangan. Inklusi, secara harfiah diartikan sebagai memasukkan. Sementara itu, keuangan, secara harfiah diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan uang. Namun, jika kedua kata ini digabung, maka arti yang muncul menghasilkan makna baru yang melibatkan sebuah agenda global. Agenda inklusi keuangan ini juga sematamata dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko, mengelola uang agar dapat dikonsumsi di kemudian hari, hingga pada akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.⁵¹ Hal ini juga terkait dengan cara melibatkan sebanyak mungkin konsumen yang sebelumnya tidak dilirik oleh lembaga keuangan, sehingga kemudian mempunyai lebih banyak akses ke lembaga

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.112.

⁵¹ Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 221.

keuangan formal dibandingkan ke lembaga informal dengan skema regulasi yang memadai.

Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan sesuai prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah merupakan sarana untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap praktik keuangan syariah.⁵²

2. Tinjauan *Sharia Financial Inclusion*

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar memeluk Islam secara kaffah, yang dimaksud dengan kaffah adalah melaksanakan segala syariat Islam secara keseluruhan (totalitas) tidak memilah-milah antara aturan agama yang satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi apa yang tidak kita sukai menjadi hal yang buruk buat kita. seharusnya sebagai ummat muslim masyarakat Indonesia tidak mengalami kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan syariah untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka.

Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah cukup lengkap. Mulai industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Selama dua dekade terakhir, tiga sektor industri jasa keuangan syariah tersebut telah menunjukkan perkembangan cukup pesat.

⁵² *Ibid*, h. 222.

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Kunt et.al menyatakan bahwa semakin inklusif lembaga keuangan maka akan semakin besar peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keuangan seperti halnya mereka mendapatkan tunjangan atau jaminan bagi orang-orang miskin dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁵³

Keuangan syariah dengan karakteristik yang mendukung adanya inklusifitas, kesetaraan, kerja sama dan keadilan bagi semua, bisa membantu pengurangan kesenjangan di antara negara berkembang. Program inklusi keuangan sendiri, merupakan agenda utama bagi negara berkembang karena bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Untuk itu, prinsip keuangan syariah yang sejalan dengan program inklusi keuangan bisa saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Konsep Keuangan Inklusif

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan

⁵³ Asli Demircug Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, (Islamic Finance and Financial Inclusion), h. 3.

pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.⁵⁴

Perbankan berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki *share* kegiatan keuangan sampai dengan 80%. Namun demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga Pemerintah dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Berdasarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai: “Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan

⁵⁴ Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), h. 5-6.

martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.”⁵⁵

4. Visi dan Misi Keuangan Inklusif

Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan sebagai berikut: “mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.” Visi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, h. 6-8.

- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi

biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun review studi terdahulu yang digunakan penulis, diantara lain :

1. Penelitian Irin Widayati,⁵⁷ pada tahun 2012 dengan jurnal yang berjudul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya”. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam pembentukan literasi finansial baik melalui pendidikan informal di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal di lingkungan perguruan tinggi. Data dikumpulkan melalui tes dan angket terhadap 220 mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, akuntansi, dan manajemen. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang literasi finansial aspek sikap, status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, dan pembelajaran di perguruan tinggi.

⁵⁷ Irin Widayati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya”, *ASSET: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1, No. 1, Oktober 2012.

2. Penelitian oleh Isnurhadi,⁵⁸ pada tahun 2013 dengan tesis yang berjudul: “Kajian tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tingkat melek (*literacy*) masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang kemungkinan mempunyai hubungan terhadap tingkat *literacy* perbankan syariah di Indonesia tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dua variabel tersebut berpengaruh terhadap perbankan syariah yaitu pengetahuan individu terhadap muamalah di dalam Islam dan variabel upaya promosi yang dilakukan perbankan syariah sedangkan upaya promosi oleh pemerintah tidak berpengaruh.
3. Penelitian Susnaningsih Muat, Desrir Miftah, dan Hesty Wulandari,⁵⁹ pada tahun 2014 dengan jurnal yang berjudul: “Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Dampaknya terhadap Keputusan Pinjaman Pribadi”. Tujuan dari penelitian ini adalah bermaksud untuk menguji tingkat pemahaman responden terhadap literasi keuangan dan kemudian pengaruhnya terhadap keputusan pinjaman pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 24,5% responden memiliki literasi keuangan yang rendah, sementara 37,7% memiliki literasi keuangan yang berada pada level sedang, dan sisanya 37,8% memiliki literasi keuangan yang

⁵⁸ Isnurhadi, “*Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*”, (Tesis S2 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2013).

⁵⁹ Susnaningsih Muat, Desrir Miftah, dan Hesty Wulandari, “Analissi Tingkat Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pinjaman Pribadi”, *3rd Economics & Business research Festival*, 13 November 2014.

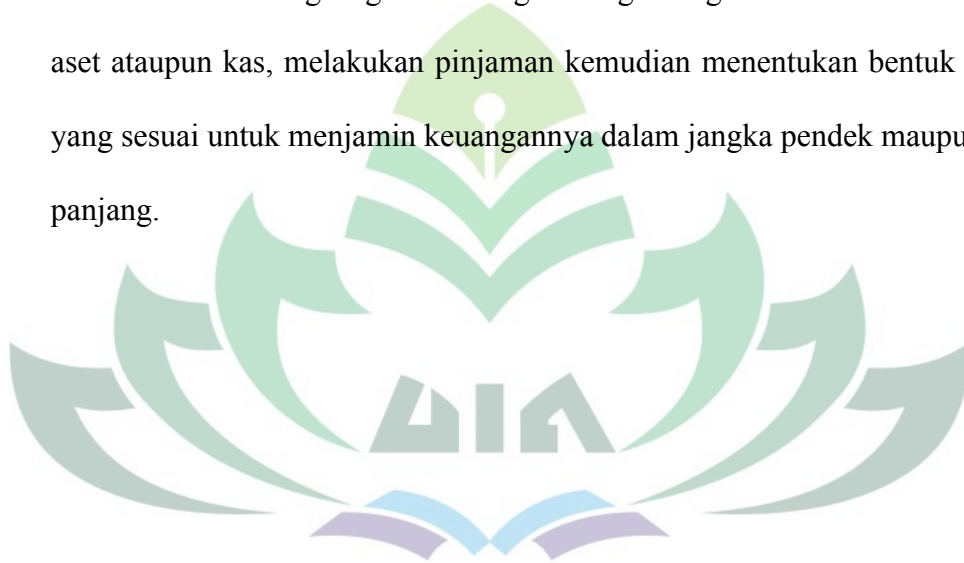
tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan pinjaman pribadi.

4. Penelitian Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi,⁶⁰ pada tahun 2015 dengan judul: “Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin, usia, tahun masuk (angkatan), IPK, tempat tinggal mahasiswa, pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua akan memengaruhi literasi keuangan mahasiswa strata I Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Hasilnya jenis kelamin (H1 diterima), usia (H2 diterima), tahun masuk (H3 ditolak), IPK (H4 diterima), tempat tinggal (H5 ditolak), pendidikan orang tua (H6 ditolak), pendapatan orang tua (H7 diterima). Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 584 mahasiswa. Penelitian ini lebih mengarah kepada pendidikan tentang *personal finance*.
5. Penelitian Welly, Kardinal, dan Ratna Juwita,⁶¹ dengan jurnal yang berjudul: “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi di STIE Multi Data Palembang secara parsial dan simultan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, aspek-aspek dari literasi keuangan diantaranya pengetahuan umum

⁶⁰ Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi, “Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi”. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol.17 No.1 Maret 2015, h 76-85.

⁶¹ Welly, Kardinal, dan Ratna Juwita, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang”. *Jurnal eprints.mdp.ac.id*

keuangan pribadi, simpanan, asuransi, dan investasi secara simultan (keseluruhan) memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dosen, karyawan, dan mahasiswa di STIE multi Data Palembang. Namun, secara parsial hanya aspek simpanan dan pinjaman serta investasi saja yang mempengaruhi secara signifikan keputusan dosen, karyawan, dan mahasiswa di STIE Multi Data Palembang. Karena aspek simpanan dan pinjaman serta investasi secara langsung berhubungan dengan bagaimana individu mengelola aset ataupun kas, melakukan pinjaman kemudian menentukan bentuk investasi yang sesuai untuk menjamin keuangannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



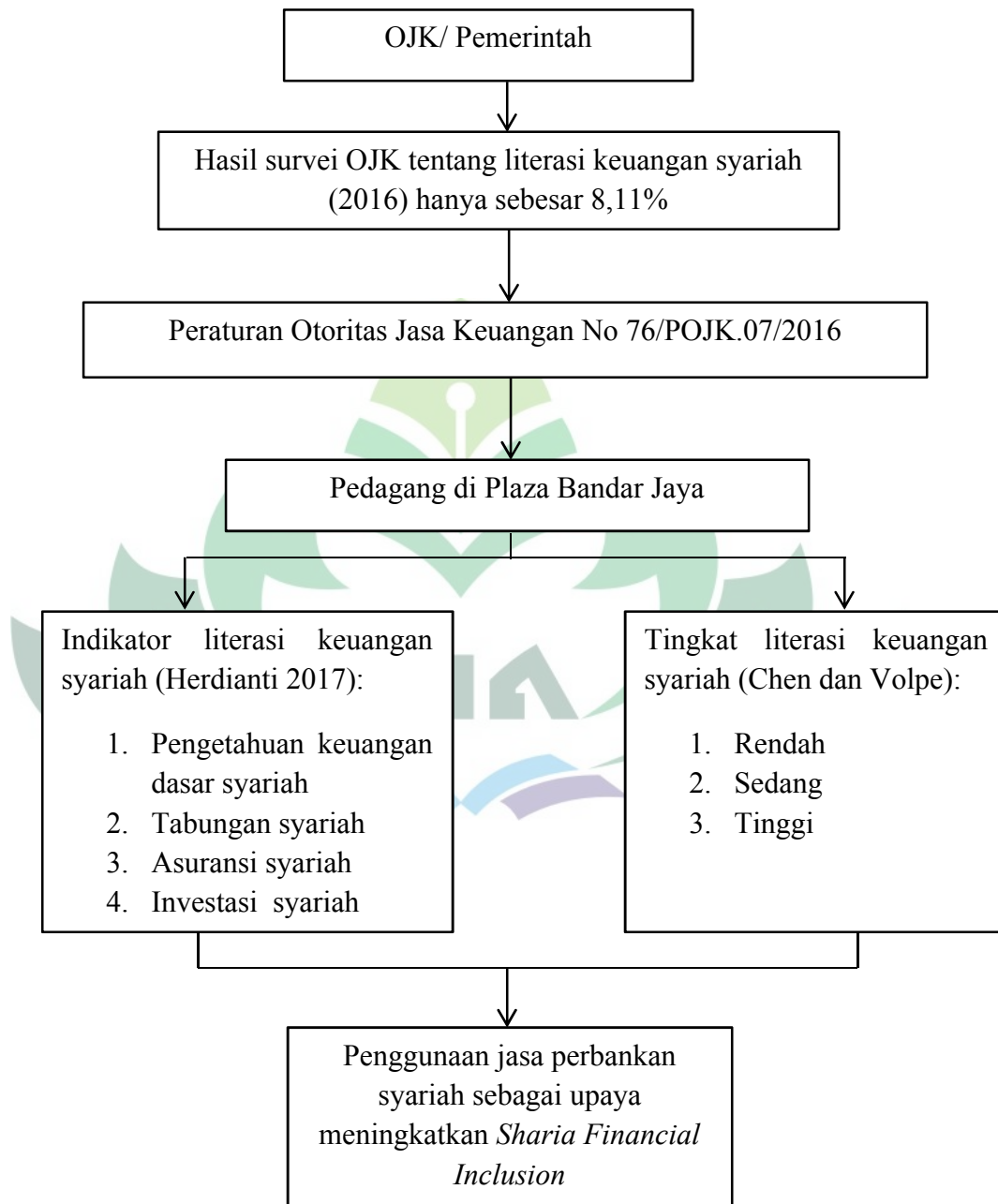
Tabel 2.1
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Penelitian Irin Widayati, dengan jurnal Volume 1, No. 1, Oktober 2012. | “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya”. | Faktor-faktor yang diteliti berpengaruh positif terhadap literasi finansial mahasiswa | Variabel yang digunakan hanya satu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial |
| 2 | Isnurhadi, pada tahun 2013 dengan tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2013 | “Kajian tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)”. | dua variabel x berpengaruh terhadap perbankan syariah yaitu pengetahuan individu dan variabel upaya promosi yang dilakukan perbankan syariah | Variabel y yang digunakan hanya satu, yaitu terhadap perbankan syariah |
| 3 | Susnaningsih Muat, Desrir Miftah, dan Hesty Wulandari, dengan jurnal 13 November 2014 | “Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Dampaknya terhadap Keputusan Pinjaman Pribadi” | literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan pinjaman pribadi. | Variabel y yang digunakan yaitu dampaknya terhadap keputusan pinjaman pribadi. |
| 4 | Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi, dengan jurnal Vol.17 No.1 Maret 2015 | “Tingkat Literasi Keuangan pada | jenis kelamin (H1 diterima), usia (H2 | Variabel yang digunakan hanya satu, |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi” | diterima), tahun masuk (H3 ditolak), IPK (H4 diterima), tempat tinggal (H5 ditolak), pendidikan orang tua (H6 ditolak), pendapatan orang tua (H7 diterima). | yaitu tingkat literasi keuangan mahasiswa |
| 5 | Welly, Kardinal, dan Ratna Juwita dengan jurnal, <i>Jurnal eprints.mdp.ac.id</i> | “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang” | aspek-aspek dari literasi keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi | Variabel y yang digunakan yaitu keputusan investasi |

F. Kerangka pemikiran

Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran



Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLKI) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah masih rendah yakni hanya sekitar 8,11% masyarakat yang berada pada tingkat kategori tinggi. Pada tahun 2013, OJK sudah meluncurkan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan tujuan peningkatan tingkat pemahaman keuangan dan mempermudah akses terhadap lembaga keuangan. Target program tersebut meliputi perempuan, mahasiswa/pelajar atau pemuda, UMKM, karyawan, profesi, petani dan nelayan, TKI dan calon TKI, pensiunan, masyarakat daerah terpencil, tertinggal, terluar dan penyandang disabilitas.

Hal ini juga selaras dengan POJK No.76/POJK.07/2016 yang menyatakan bahwa perlu diadakannya edukasi tentang keuangan kepada masyarakat dengan menjelaskan tentang literasi beserta tujuannya. Pedagang di Plaza Bandar Jaya sudah seharusnya memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik, karena sekitar Plaza Bandar Jaya terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang sudah melakukan edukasi kepada para pedagang.

Menurut Herdianti dalam penelitiannya tingkat keuangan syariah dapat diukur melalui empat kriteria, yaitu literasi tentang pengetahuan dasar keuangan syariah, tabungan syariah, asuransi syariah dan investasi syariah. Dari tingkat pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah tersebut, maka sudah seharusnya masyarakat banyak yang menggunakan lembaga jasa perbankan syariah guna meningkatkan *sharia financial inclusion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi, *“Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum, STAIN Kudus”*, Kudus, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor Ghalia Indonesia cet.I, 2005.
- Elly, M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet. Ke-3 Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, Jakarta: Bank Indonesia, 2014.
- Hair, Joseph F. *“Essentials of Business Research Methods”*, t.tp:t.p, 2006.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasim, Frida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Irin Widyawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Financial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya”, (*ASSET: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Volume 1, No. 1, 2012)
- Isnurhadi. *“Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)”*, eprints.unsri.ac.id, 2013.
- Istman M.P, *“Pidato G-20, Presiden Singgung Ekonomi Inklusif Lagi”*, dalam www.tempo.com, 5 September 2016.
- Karim, Adiwarman A. *“ Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan “*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Laily, Nujmatul. “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan”. (Journal of Accounting and Business Education. 2016)
- M. Syafi’I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- Margaretha, Farah dan Reza Arief Pambudhi. “*Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi*”. JMK, Vol. 17, No. 1, 2015.
- Margaretha, Farah., dan Sari, Siti May. “Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna Kartu Kredit Di Indonesia”. (Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol.16, No. 2 Juli 2015)
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kalitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi, 2009.
- Muammar, Khaddafi, “Akuntansi Syariah”, Medan: Madenatera, 2016.
- Muat, Susnaningsih, Desrir Miftah, dan Hesty Wulandari. “*Analisis Tingkat Literasi keuangan dan dampaknya terhdapa Keputusan Pinjaman Pribadi*”. 3rd Economics & Business research Festival, 2014.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nengsih, Novia. “*Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*”, Etikonomi: Jurnal UIN Jakarta Volume 14 (2), Oktober 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. “*Statistik Perbankan Syariah*”. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2018
- Rahma, Ghoida. “*Ini 7 Masalah Bank Syariah*”. Tempo.com, 2015.
- Rakhmindyanto dan Syaifullah. “*Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*”, www.kemenkeu.com.

Rianse, Usman dan Abdi. *“Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi”*. Bandung: Alfabeta, cet. iii, 2012.

S.P Wagland, and Taylor, “When It Comes To Financial Literacy , Is Gender Really An Issue?”, *Australian Accounting Business and finance Journal*, Vol. 3, No.1 Mei 2009.

Soemitra, Andri, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, Jakarta: Kencana, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: CV.Widya Karya.

Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung Pustaka Setia, 2001

Syauki Beik, Irfan, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”* , Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Welly, Kardinal, dan Ratna Juwita *“Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang”*.

www.agustiantocentre.com

www.bps.go.id

www.ekonomiislam.com

www.ojk.go.id